

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN,
BELANJA DAERAH DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAMBI**

Mardianis¹⁾, H. Afrizal, Enggar D.P Arum²⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017,*

²⁾*Dosen Pembimbing*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of local revenue (PAD), Balancing Funds, Regional Expenditures and Audit Opinion BPK on the Performance of Local Government of districts / City in Jambi Province. The research was conducted on all (population) of districts / City in Jambi Province.

The method of selecting the sample using purposive sampling for the year 2009 until the year 2013 the complete data except the City Sungai Penuh so that only done to 10 districts / cities. While the analytical techniques used in this study is descriptive qualitative and quantitative analysis. The research data is obtained from secondary data from several government agencies that have been published widely. While the data panel analysis using some processing techniques are Pooled Least Square, Fixed Effect, and Random Effect.

Result of research and hypothesis test show that partial test result, variable of Local Revenue (PAD) proxied with Local Revenue Ratio to Total Revenue, balancing Fund variable which proxied with Ratio of Balance Fund to Total Revenue, variable of realization of Regional Expenditures proxy with ratio of total realization Regional expenditure on budget, and audit opinion variables do not significantly influence the performance of the administrations of District /City Government in Jambi Province. While simultaneously, proving that the variable of Local Revenue (PAD), Balancing Fund, Regional Expenditures and Audit Opinion BPK RI, have an effect but not significant to performance of Local Government of Districts / City in Jambi Province during period 2009-2013 with value adjusted R Squared only explains 18.71% of the variable Performance of Local Government.

Keywords: *Performance of Local Government Implementation, EKPPD, Local Revenue (PAD), Balancing Fund, Regional Expenditure, Audit Opinion.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan terhadap seluruh (populasi) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang datanya lengkap kecuali Kota Sungai Penuh sehingga hanya dilakukan terhadap 10 Kabupaten/Kota. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari data sekunder dari beberapa instansi pemerintah yang sudah dipublikasikan secara luas. Sedangkan analisis Data Panel menggunakan beberapa teknik pengolahan yaitu Pooled Least Square, Fixed Effect, dan Random Effect.

Hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hasil uji secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah yang diproksikan dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan, variabel Dana Perimbangan yang diproksikan dengan Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, variabel realisasi belanja daerah yang diproksikan dengan rasio total realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja, dan variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan secara simultan, membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, Belanja Daerah serta Opini Audit BPK RI, berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2009-2013 dengan nilai adjusted R squared hanya menjelaskan 18.71% dari variabel kinerja penyelenggaraan Pemda.

Kata Kunci: Kinerja Penyelenggaraan Pemda, EKPPD, PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Opini.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bentuk pemerintah Indonesia yang meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota yang terbingkai dalam wadah NKRI, membawa konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan atau pelimpahan kewenangan dari ketiga tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber pembiayaan bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (Halim, 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan menurut Halim (2002) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah

secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Hafidh Susila Sudarsana dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013) tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia) menyimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, untuk temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan ukuran daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian lain terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara-lain faktor keuangan dan faktor lingkungan. Penelitian yang dilakukan Patrick, 2007 dalam Sumarjo (2010) telah meneliti mengenai karakteristik daerah yang diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. Ia meneliti tentang komponen organisasi yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi inovasi administratif. Variabel yang ia gunakan untuk memproksikan karakteristik daerah terdiri atas (a) ukuran daerah; (b) *functional differentiation*; (c) umur daerah; dan (d) *intergovernmental revenue*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al., (2011) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menggunakan variabel ukuran daerah (*size*), jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Status Daerah untuk memproksikan karakteristik pemerintah daerah. Penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) menggunakan ukuran daerah (*size*), tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian tentang Kinerja Pemerintah Daerah juga dilakukan oleh Hermaningsih (2009) yang meneliti pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak) menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Indonesian Governance Index (IGI) pada tahun 2014 terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) data sejak tahun 1999-2013, tercatat penambahan pemekaran daerah sebanyak 220 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sehingga jumlah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia adalah 542 Kab/Kota.

Di antara 34 sampel daerah yang dievaluasi IGI, terdapat 10 Daerah Otonom Baru (DOB). Dari 10 daerah tersebut, hanya 2 daerah berada di atas rata-rata nasional yaitu Siak dan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan 8 daerah lainnya berada di bawah rata-rata nasional yaitu Ternate, *Tanjung Jabung Timur*, Tanjung Pinang, Pulang Pisau, Seluma, Bangka Selatan, Tangerang Selatan, dan Sigi. Rata-rata daerah ini telah berdiri lebih dari 10 tahun kecuali Sigi dan Tangerang Selatan yang baru berdiri 6 tahun. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, DOB yang sudah ada, yang terbukti tidak mampu (kinerja buruk) bisa dihapus (Djohermansyah Djoha, Jakarta 2014).

Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 memiliki opini audit BPK yang kecenderungan semakin membaik. Adapun skor peringkat penilaian kinerja Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Jambi tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan penilaian dan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Skor Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013

| Pemerintahan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kota Jambi | 2.3525 | 1.8142 | 2,4889 | 2.0018 | 1,6670 |
| Kab. Batang Hari | 2.3467 | 2.4074 | 2,4530 | 2.6239 | 2,5986 |
| Kab.Bungo | 2.2633 | 1.7035 | 2,5407 | 3.0017 | 2,8911 |
| Kab.Kerinci | 1.7178 | 2.3032 | 2,4365 | 1.5205 | 2,2221 |
| Kab.Merangin | 2.3740 | 2.3621 | 2,3398 | 1.9064 | 2,9343 |
| Kab.Muaro Jambi | 2.4813 | 1.7772 | 2,3893 | 1.7587 | 2,5603 |
| Kab.Sarolangun | 2.3702 | 2.0082 | 2,7340 | 1.9378 | 2,6906 |
| Kab.Tanjab Barat | 1.6306 | 1.4495 | 1,7974 | 1.7857 | 2,4127 |
| Kab.Tanjab Timur | 1.7876 | 1.6861 | 1,9072 | 2.1307 | 2,0245 |
| Kab.Tebo | 2.4594 | 2.5975 | 2,4659 | 1.9331 | 2,0356 |

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--------|--------|
| Kota Sungai Penuh*) | - | - | - | 2.5136 | 2,7153 |
|---------------------|---|---|---|--------|--------|

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Web:<http://otda.kemendagri.go.id/>

Catatan :*) Data untuk Kota Sungai Penuh mulai tersedia pada tahun 2012

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagaimana tergambar pada tabel 2. Dibawah ini:

Tabel 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013

| Pemerintahan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Kota Jambi | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| Kab. Batang Hari | WDP | WDP | WDP | WTP* | WTP* |
| Kab.Bungo | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| Kab.Kerinci | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| Kab.Merangin | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| Kab.Muaro Jambi | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| Kab.Sarolangun | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| Kab.Tanjab Barat | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| Kab.Tanjab Timur | WDP | WDP | WDP | WTP* | WTP* |
| Kab.Tebo | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| Kota Sungai Penuh*) | WTP | WDP | WDP | WTP | WTP |

Sumber : Diolah dari Jambi Dalam Angka 2014 dan Web BPK RI : <http://bpk.go.id/>

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP * : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti ingin menggunakan beberapa variabel independen yang berbeda dalam penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK RI terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi secara lebih mendalam. Adapun judul dari penelitian ini adalah "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian dalam pertanyaan

sebagai berikut:

1. Apakah Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
3. Apakah Terdapat Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
4. Apakah Terdapat Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
5. Apakah secara bersama-sama terdapat terdapat Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Menganalisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi.
3. Menganalisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi.
4. Menganalisis Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Menganalisis Pengaruh secara bersama-sama PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini berupa kontribusi empiris, teori dan kebijakan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

3. Bagi pihak Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan penyediaan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah yang dimuat dalam LPPD, LKPJ dan laporan lainnya.

4. Bagi penulis

Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi.

2. LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan dalam penelitian ini karena adanya hubungan antara pemerintah pusat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agent*), dan juga hubungan masyarakat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agent*). Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah *principal* dan pemerintah adalah *agent*. *Agent* diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan *principal*, dan akuntabilitas kinerja atas amanah yang diberikan oleh masyarakat (*Principal*) dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah (*agent*). *Principal* memiliki wewenang pengaturan kepada *agent*, dan memberikan sumberdaya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen menyebabkan munculnya masalah agensi. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Hartas (2011) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*) dengan mengabaikan kepentingan orang lain, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) bahwa manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Dengan demikian, seorang agen akan mengambil tindakan yang lebih menguntungkan diri sendiri (*opportunistic*) dibandingkan dengan kepentingan prinsipal sehingga dapat menimbulkan konflik. Dalam hal ini, prinsipal (pemilik) menuntut akuntabilitas dari agen tetapi ada kemungkinan agen takut untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan (Januarti, 2009).

Menurut Teori keagenan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah

daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan, 2012).

Sehingga teori agensi menjadi dasar penelitian ini mengenai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (agen). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agen* dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agen* (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu sisi, *agent* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.

Berdasarkan *theory agency* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Diharapkan dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang artinya *informatif asymmetry* yang terjadi dapat berkurang.

2.1.2. Teori Stakeholder

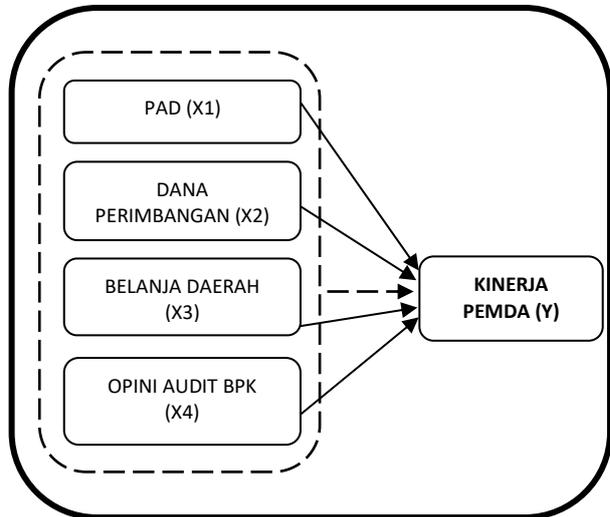
Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja atau *stakeholder* perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 2001). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama *stakeholder* yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghazali, 2007).

Dalam hubungannya teori *stakeholder* dengan penelitian ini, pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai organisasi publik yang mempunyai kepentingan terhadap para pemangku kepentingan.

Adapun pemangku kepentingan terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah pusat dan masyarakat.

2.2. Kerangka Penelitian

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.



Gambar. 1. Kerangka Pemikiran

Variabel Independent:

| | |
|------------------|------|
| PAD | : X1 |
| Dana Perimbangan | : X2 |
| Belanja Daerah | : X3 |
| Opini Audit BPK | : X4 |

Variabel Dependent:

| | |
|---------------------------|-----|
| Kinerja Pemerintah Daerah | : Y |
|---------------------------|-----|

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian Wenny (2012) serta penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menemukan bahwa pendapatan Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Julitawati, *et.al* (2012) juga menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan menurut penelitian Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih (2012) bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat diterima karena mengingat besarnya porsi ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia terhadap transfer dana dari pemerintah pusat Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Dengan semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat, sebagaimana penelitian Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari (2012). Sedangkan menurut Sudarsana dan Shiddiq (2013), Tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan dengan pusat terhadap skor kinerja

Hipotesis 3: Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Penyerapan atau realisasi anggaran belanja daerah yang besar hendaknya merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik.

Menurut Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari (2012), belanja daerah ternyata terbukti berpengaruh negatif signifikan. Artinya semakin besar belanja daerah ternyata menyebabkan semakin kecil nilai skor kinerja Pemda tersebut. Sedangkan Marfiana dan Kurniasih (2012), penelitiannya menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggaran belanja daerah pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik.

Hipotesis 4: Opini Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian terhadap opini audit BPK menurut Budianto (2012) bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan sebaliknya Sucahyo Heriningsih (2015) yang hasil dari penelitian bahwa kinerja penyelenggara pemerintah daerah (skor IKK dari LPPD) secara statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kabupaten/kota yang memiliki opini WTP dengan yang memperoleh opini selain WTP.

Hipotesis 5: Secara Simultan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Selain hipotesis secara *partial* juga akan dilihat apakah secara bersama-sama variabel independent berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian

3.1.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah, Rasio Dana Perimbangan, Rasio Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3.1.2. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi yang telah diaudit BPK selama tahun 2009-2013. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang mempunyai data keuangan yang lengkap selama tahun 2009-2013, yaitu berupa data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah (Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.djpk.depkeu.go.id.)
- 2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah dilakukan audit dan memperoleh opini audit dari BPK RI selama tahun 2009-2013. (Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui www.bpk.go.id.)
- 3) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang telah menyampaikan LPPD dan telah di evaluasi LPPDnya oleh Pemerintah Pusat selama tahun 2009-2013. (Sumber : Surat Keputusan Mendagri RI melalui www.otda.kemendagri.go.id)

Berdasarkan data sementara diperoleh bahwa data tahun 2009 sampai dengan 2011 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sudah cukup tersedia, kecuali data untuk Kota Sungai Penuh. Dengan mempertimbangkan keterse- diaan dan kelengkapan data dimaksud, maka dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap 9 Kabupaten dan 1 Kota Jambi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam bentuk data *cross section* dari suatu periode yang sama dan data *time series* (runtun waktu) dari tahun 2009 sampai 2013 yang diistilahkan dengan nama *data pooled cross section-time series* atau Data Panel. Penelitian ini hanya menggunakan data sampai dengan tahun 2013, karena sampai dengan peneliti melakukan penelitian ini data hasil EKPPD untuk tahun 2014 belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.3. Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang akan dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1. Analisis kualitatif

Data sekunder dari buku teks, jurnal dan hasil penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan tesis ini dijadikan dasar bagi analisis deskriptif.

- 1). Rasio PAD menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Kriteria Penilaian Rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{Realiasi PAD}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

- 2). Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja disebut juga dengan Rasio Aktivitas, dimana rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal.

$$\text{Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja} = \frac{\text{Realiasi Belanja dalam APBD}}{\text{Total Anggaran Belanja dalam APBD}} \times 100\%$$

- 3). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. (Bisma, 2010)

$$\text{Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{Realiasi Dana Perimbangan}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

3.3.2. Analisis kuantitatif

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dari pembahasan yang dinyatakan dengan angka. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel (*pooled data*) merupakan data yang mengkombinasikan antara data deret waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Data deret waktu (*time series*) adalah data observasi pada satu subjek penelitian diamati dalam satu periode waktu, misalnya selama lima tahun. Sedangkan data kerat lintang (*cross section*) adalah data observasi pada beberapa subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun atau satu periode tertentu yang sama. Dalam data panel, observasi dilakukan pada beberapa subjek dianalisis dari waktu ke waktu. Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*. Sedangkan persamaan model dengan *time series* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, 3, \dots, T$$

Dimana T adalah banyaknya data *time series*. Hubungan antar variabel secara fungsional dinyatakan sebagai berikut:

$$BJ = f \{PAD, OA, DP, BD\}$$

Sehingga persamaan data panel merupakan pengkombinasian dari persamaan *cross section* dan *time series* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it} ; i = 1, 2, 3, \dots, N ; t = 1, 2, 3, \dots, T$$

Dimana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah banyaknya data panel.

Oleh karena itu, variabel-variabel dalam penelitian ini diaplikasikan dalam sebuah model, sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D + \mu_{it}$$

Dimana:

- Y_{it} = Kinerja Penyelenggaraan Pemda
- α = Koefisien intersep
- β = Slope atau Koefisien slope
- X_1 = Rasio Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Rasio Dana Perimbangan
- X_3 = Rasio Belanja Daerah
- D = Dummy Variabel (Opini Audit)
- i = 1, 2 ... N (individu)
- t = 1, 2 ... T (Waktu)
- μ = *error term*

3.4. Metode Pengolahan Data

Data Panel memiliki beberapa teknik pengolahan data yaitu *Pooled Least Square*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* (Gujarati, 2004). Deskripsi ketiga model tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) ***Pooled Least Square (PLS)***, *Pooled Least Square* merupakan teknik estimasi untuk kombinasi data *time series* dan *cross section*. Teknik *Pooled Least Square* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{1it} + \mu_t \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, N \text{ dan } T = 1, 2, \dots, T$$

- 2) ***Fixed Effect***, Estimasi menggunakan model *Fixed Effect* dapat dilakukan berdasarkan asumsi tertentu berkenaan konstanta, *slope coefficient*, dan *error term*. Penelitian ini akan berfokus pada kasus ketika *slope coefficient* konstan tetapi nilai konstanta berubah-ubah untuk setiap individu. Model *fixed Effect* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_n D_{n-1,i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \mu_{it}$$

- 3) Model *random effect* meng-asumsikan konstanta sebagai variabel acak dengan nilai rata-rata β_1 daripada sebagai variabel tetap. Model *random effect* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

untuk $i=1,2,\dots,N$ dan $t = 1,2,T$

Dengan $\beta_{1i} = \beta_1 + \varepsilon_i$

3.5. Evaluasi Hasil Regresi

Evaluasi atas hasil regresi dilakukan dengan mengamati antara lain nilai F statistik, nilai t statistik, nilai R^2 , nilai adjusted R^2 , dan kesesuaian tanda (positif atau negatif) koefisien dengan teori.

3.5.1. Evaluasi Koefisien Variabel Bebas Secara Bersamaan

Evaluasi ini dinamakan uji F. Semua koefisien variabel bebas diuji secara bersamaan untuk memeriksa terdapat *slope coefficient* variabel bebas yang tidak sama dengan nol. Berikut ini adalah hipotesis uji F dengan enam variabel bebas.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Jika F statistik lebih besar dari $F_{\alpha,k,n-k-1}$ atau probabilitas F statistik lebih kecil dari α (*level of significance*) maka H_0 ditolak. Jika F statistik lebih kecil dari $F_{\alpha, k, n-k-1}$ atau probabilitas F statistik lebih besar dari α maka H_0 diterima. Penerimaan H_0 mengartikan bahwa koefisien variabel bernilai nol atau dengan kata lain variabel bebasnya tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Penolakan H_0 mengartikan bahwa paling tidak terdapat satu koefisien variabel bebas yang tidak sama dengan nol atau dengan kata lain variabel bebas itu memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

3.5.2. Evaluasi Koefisien Variabel Bebas secara Individu

Uji t berguna untuk menguji signifikansi pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien variabel bebas tidak sama dengan nol menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien variabel bebas sama dengan nol menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut tidak mempengaruhi variabel terikat. Berikut adalah hipotesis untuk masing-masing variabel bebas.

1. $H_0 : \beta_2 = 0$ (Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda)
 $H_1 : \beta_2 \neq 0$ (Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda)
2. $H_0 : \beta_3 = 0$ (Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda)
 $H_1 : \beta_3 \neq 0$ (Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda)

3. $H_0 : \beta_4 = 0$ (Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda)
 $H_1 : \beta_4 \neq 0$ (Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda)
4. $H_0 : \beta_1 = 0$ (Opini Audit tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda)
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (Opini Audit mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda)

Untuk keempat hipotesis tersebut, bila t statistik $> t_{\alpha/2, df}$ dengan *degree of freedom* adalah $n-k$ (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter yang diestimasi) atau bila probabilitas t statistik lebih kecil dari α (*level of significance*) maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak berarti variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, penerimaan H_0 berarti variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.

3.5.3. Evaluasi Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*goodness of fit*) dinotasikan dengan R^2 yang adalah suatu ukuran untuk menentukan baik atau tidaknya model regresi yang terstimasi. Angka ini menunjukkan sebesar apa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.

Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R^2 sebesar nol menunjukkan bahwa variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan sama sekali oleh variabel bebas sedangkan nilai R^2 sebesar satu menunjukkan bahwa variasi dari variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel bebas.

Kelemahan R^2 adalah R^2 cenderung meningkat jika ditambahkan variabel bebas baru ke dalam model sehingga nilai R^2 menjadi kurang akurat untuk menilai model. Maka, digunakan juga *adjusted* R^2 untuk menilai baik atau tidaknya suatu model. Nilai *adjusted* R^2 akan meningkat hanya jika variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model benar benar efisien. Kesimpulannya, model yang baik ditunjukkan oleh nilai R^2 dan *adjusted* R^2 yang tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada $0^{\circ}45' - 2^{\circ}45'$ LS dan $101^{\circ}10' - 104^{\circ}55'$ BT di bagian tengah Pulau Sumatera, **sebelah Utara** berbatasan dengan Provinsi Riau, **sebelah Timur** dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, **sebelah Selatan** berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan **sebelah Barat** berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS- GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas $53.435,72 \text{ km}^2$.

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara Rata-rata Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, meningkat dari PAD rata-rata Rp.23,694 Milyar menjadi Rp.53,054 Milyar sedangkan Dana Perimbangan dari rata-rata Rp.449,554 Milyar menjadi 802,993 Milyar

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara Rata-rata Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, meningkat dari PAD rata-rata Rp.23,694 Milyar menjadi Rp.53,054 Milyar sedangkan Dana Perimbangan dari rata-rata Rp.449,554 Milyar menjadi 802,993 Milyar

Selanjutnya pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dan Dasar Hukum Pembentukannya

| No. | Nama Kabupaten / Kota | Dasar Hukum Pembentukan |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | Kabupaten Batang Hari | UURI No. 12 Tahun 1956 |
| 2. | Kabupaten Bungo | UURI No. 54 Tahun 1999 |
| 3. | Kabupaten Kerinci | UURI No. 12 Tahun 1956 |
| 4. | Kabupaten Merangin | UURI No. 54 Tahun 1999 |
| 5. | Kabupaten Muaro Jambi | UURI No. 54 Tahun 1999 |
| 6. | Kabupaten Sarolangun | UURI No. 54 Tahun 1999 |
| 7. | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | UURI No. 54 Tahun 1999 |
| 8. | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | UURI No. 54 Tahun 1999 |
| 9. | Kabupaten Tebo | UURI No. 54 Tahun 1999 |
| 10. | Kota Jambi | UURI No. 09 Tahun 1956 |
| 11. | Kota Sungai Penuh | UURI No. 25 Tahun 2008 |

Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Jambi.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil output dari regresi panel data dengan metode *Fixed Effect* dapat dilihat pada tabel 4 penelitian ini.

Tabel 4. Output Fixed Effect

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 2.987266 | 2.253439 | 1.325648 | 0.1933 |
| PAD? | 10.33869 | 8.634971 | 1.197304 | 0.2390 |
| DP? | -1.541242 | 1.927324 | -0.799680 | 0.4291 |
| BD? | 0.060060 | 0.858259 | 0.069979 | 0.9446 |
| D? | 0.034487 | 0.174023 | 0.198174 | 0.8440 |
| Effects Specification | | | | |
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | | |
| R-squared | 0.402739 | Mean dependent var | 2.201642 | |
| Adjusted R-squared | 0.187061 | S.D. dependent var | 0.390982 | |
| S.E. of regression | 0.352522 | Akaike info criterion | 0.984088 | |
| Sum squared resid | 4.473780 | Schwarz criterion | 1.519454 | |
| Log likelihood | -10.60219 | Hannan-Quinn criter. | 1.187958 | |
| F-statistic | 1.867318 | Durbin-Watson stat | 2.340249 | |
| Prob(F-statistic) | 0.069407 | | | |

Sumber: data Eviews 8.0

Dari tabel 4 penelitian ini dapat ditemukan bahwa jumlah variabel individu atas uji *t-stat* ada yang memberikan hasil yang signifikan dengan nilai *t-table* sebesar 1.67943. Dengan nilai *adjusted R²* sebesar 0.187061 memberikan nilai yang cukup memuaskan. Nilai *probability* dari *f-stat* senilai 0.069407 memberikan artian bahwa model tersebut *highly significant* dengan nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 2.340249 yang berada pada kisaran ($1,5 < DW\text{-Stat} < 2,5$).

Hasil pengujian kesesuaian dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu model regresi, karena variabel penelitian lebih dari dua variabel maka dapat dilihat dari nilai *adjusted R square*. Nilai *adjusted R square* yang diperoleh dari hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah.

Nilai *adjusted R squared* pada tabel 4.2 dibawah sebesar 0.187061, hal ini menunjukkan bahwa 18.7% variabel kinerja penyelenggaraan Pemda dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja, dan Opini Audit. Sisanya sebesar 81.29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini. Untuk melihat tingkat kepercayaan hasil uji hipotesis, selanjutnya dilakukan uji signifikansi. Uji signifikansi dibedakan atas uji signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi parsial (uji t) dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$.

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Uji Simultan (Uji-F)

Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak; dan apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 dapat diterima. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Uji F

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.402739 | Mean dependent var | 2.201642 |
| Adjusted R-squared | 0.187061 | S.D. dependent var | 0.390982 |
| S.E. of regression | 0.352522 | Akaike info criterion | 0.984088 |
| Sum squared resid | 4.473780 | Schwarz criterion | 1.519454 |
| Log likelihood | -10.60219 | Hannan-Quinn criter. | 1.187958 |
| F-statistic | 1.867318 | Durbin-Watson stat | 2.340249 |
| Prob(F-statistic) | 0.069407 | | |

Sumber: data diolah *evIEWS 8.0*

Dari tabel 5 diperoleh nilai Fhitung sebesar 1.867318 sedangkan Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 2.56. Hal ini berarti bahwa nilai Fhitung < Ftabel (1.867318 < 2,56). Hal ini memberikan arti bahwa Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja, Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan dan variabel Opini Audit **tidak berpengaruh** terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi simultan diterima.

4.3.2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji hipotesis penelitian untuk hubungan variabel bebas dengan variabel terikat yang telah dibuat sebelumnya dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 dibawah.

Pertama, Uji signifikansi yang dilakukan terhadap variabel bebas dapat dilihat dari nilai p-value t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$) variabel rasio realisasi PAD terhadap total pendapatan memiliki p-value t-stat 0.2390. Karena nilai tersebut > 0,05 maka variabel ini berada pada daerah terima Ho. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel rasio realisasi PAD terhadap total pendapatan merupakan variabel yang **tidak mempengaruhi** kinerja penyelenggaraan Pemda.

Kedua, Uji signifikansi yang dilakukan terhadap variabel bebas dapat dilihat dari nilai p-value t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$) variabel Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan memiliki p-value t-stat 0.4291. Karena nilai tersebut > 0,05 maka variabel ini berada pada daerah terima Ho. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan merupakan variabel yang **tidak mempengaruhi** kinerja penyelenggaraan Pemda.

Tabel 6. Uji t

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 2.987266 | 2.253439 | 1.325648 | 0.1933 |
| PAD? | 10.33869 | 8.634971 | 1.197304 | 0.2390 |
| DP? | -1.541242 | 1.927324 | -0.799680 | 0.4291 |
| BD? | 0.060060 | 0.858259 | 0.069979 | 0.9446 |
| D? | 0.034487 | 0.174023 | 0.198174 | 0.8440 |

Sumber: data diolah *evIEWS 8.0*

Ketiga, Uji signifikansi yang dilakukan terhadap variabel bebas dapat dilihat dari nilai p-value t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$) variabel rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja memiliki p-value t-stat 0.9446. Karena nilai tersebut > 0,05 maka variabel ini berada pada daerah terima Ho. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan variabel yang **tidak mempengaruhi** kinerja penyelenggaraan Pemda.

Keempat, Uji signifikansi yang dilakukan terhadap variabel bebas dapat dilihat dari nilai p-value t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 90% ($\alpha = 10\%$) variabel opini audit memiliki p-value t-stat 0.8440. Karena nilai tersebut > 0.5 maka variabel ini berada pada daerah tolak Ho. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel opini audit **tidak mempengaruhi** kinerja penyelenggaraan Pemda.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1. Secara Parsial Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Dari hasil penelitian berdasarkan Uji signifikansi (Uji t) didapatkan bahwa variabel bebas tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemda. Hal ini disebabkan banyaknya variabel lain di luar variabel Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja, dan Opini Audit terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

Pertama, hasil pengujian secara parsial atas variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih (2012) yang menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan menggunakan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total realisasi pendapatan daerah.

Kedua, hasil pengujian secara parsial atas variabel Dana Perimbangan yang menunjukkan bahwa tidak

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sejalan dengan hasil penelitian Hafidh Susila Sudarsana dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013) yang menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total realisasi pendapatan daerah, berdasarkan hasil uji regresi logistik ordinal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Ketiga, hasil pengujian secara parsial atas variabel Belanja Daerah yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini sejalan dengan penelitian Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriyani (2012) yang menyimpulkan bahwa variabel belanja daerah dengan proksi Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja, variabel belanja daerah ternyata terbukti berpengaruh negatif signifikan. Artinya semakin besar belanja daerah ternyata menyebabkan semakin kecil nilai skor kinerja sekaligus menunjukkan bahwa kemungkinan pengeluaran Pemda lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, hasil pengujian secara parsial atas variabel Opini Audit yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini sejalan dengan penelitian Sucahyo Heriningsih (2015) yang menyimpulkan bahwa kinerja penyelenggara pemerintah daerah (skor IKK dari LPPD) secara statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kabupaten/kota yang memiliki opini WTP dengan yang memperoleh opini selain WTP serta secara statistik juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan Tingkat Korupsi (Indeks persepsi Korupsi modifikasi) antara kabupaten/kota yang memiliki opini WTP dengan yang memperoleh opini selain WTP. Penelitian lain yang mendukung pernyataan ini adalah Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa opini audit belum cukup untuk menjelaskan keterkaitannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Terhadap opini audit hasil penelitian menunjukkan tidak berpengaruh, disebabkan karena audit oleh BPK RI adalah audit atau pemeriksaan keuangan sebagaimana maksud ayat 2 pasal 4 Undang undang nomor 15 tahun 2014, bahwa pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan audit suatu pemerintah daerah. Bukan merupakan audit terhadap penyelenggaraan kinerja sebagaimana maksud ayat 3 pasal 4 Undang undang nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4.4.2. Secara Simultan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Dari hasil penelitian ini dengan nilai adjusted R squared sebesar 0.187061, artinya bahwa 18.7 % variabel kinerja penyelenggaraan Pemda dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja, dan Opini Audit. Sedangkan sisanya sebesar 81.29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini.

Sedangkan untuk melihat tingkat signifikansinya secara simultan dilakukan uji F dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ yang diperoleh bahwa nilai Fhitung $< F_{tabel}$ ($1.867318 < 2,56$). Hal ini memberikan arti bahwa Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja, Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan dan variabel Opini Audit **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah yang diprosikan dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda Kabupaten Kota di Provinsi Jambi.
- 2) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel Dana Perimbangan yang diprosikan dengan Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda Kabupaten Kota di Provinsi Jambi.
- 3) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel realisasi belanja daerah yang diprosikan dengan rasio total realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda Kabupaten Kota di Provinsi Jambi.
- 4) Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten/ Kota yang mendapat opini audit WTP atau yang opini audit tidak WTP, tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda Kabupaten Kota di Provinsi Jambi.
- 5) Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah serta Opini Audit BPK RI, secara simultan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2009-2013.

5.2. Saran

Saran dari penelitian ini yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebaiknya secara simultan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta memanfaatkan pengeluarannya melalui Belanja Daerah yang prioritasnya adalah untuk peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan memperoleh opini audit WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik..
- 2) Penelitian ini menggunakan data panel untuk kabupaten / kota di Provinsi Jambi dari Tahun 2009 s.d 2013, hasil EKPPD diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI setelah 2 (dua) tahun. Maka peneliti tidak dapat menggunakan data hasil EKPPD tahun 2014 dan yang terbaru, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah tahun penelitian sampai dengan tahun 2014 dan menambah objek penelitian untuk kabupaten/kota di Indonesia untuk dapat melihat hasil pengujian yang mungkin berbeda dengan menambahkan tahun penelitian dan objek penelitian.
- 3) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan 18.71% dari variabel kinerja penyelenggaraan Pemda yaitu Rasio Realisasi PAD Terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja dan Opini Audit BPK RI. Sisanya sebesar 81.29% dipengaruhi oleh variabel lain dari kriteria penilaian kinerja penyelenggaraan Pemda yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Maka, pada penelitian selanjutnya dapat dimasukkan faktor-faktor lain yang belum diuji dalam penelitian ini sesuai dengan maksud Permendagri Nomor 73/2009.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia., www.bpk.go.id [20 September 2015].;
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia., <http://jambi.bps.go.id> [20 September 2015].;
- Bambang, Kesit Prakosa., 2004., *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Kasus Empirik di Wilayah*

Propinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol. 8 No. 2.;

- Bastian, I. 2001., *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah.*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.;
- Brahmantio dan Tri Wibowo, 2002, *Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Surakarta)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 6, No.1.;
- Brown, R. M., Muralidhar, K., Brown, R. M., Janney, J. J., dan Paul, K., 2001., *An empirical investigation of the relationship between change in corporate social performance and financial performance: A stakeholder theory perspective.* Journal of Business ethics, 32(2), 143-156.;
- Chariri, A., dan Ghozali, I., 2007., *Teori Akuntansi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.;
- Djaenuri, Aries., 2012., *Sistem Pemerintahan Daerah.*, Jakarta., Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.;
- Djohermansyah Djohan., [Republika Online Rabu 15 Oktober 2014 : http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/14/10/15/ndh4s546-pemekaran-daerah-bisa-dibatalkan.](http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/14/10/15/ndh4s546-pemekaran-daerah-bisa-dibatalkan), [09 September 2016].;
- Eisenhardt, Kathleem. M., 1989., *Agency Theory: An Assesment and Review.* Academy of management Review, vol.14.;
- Freeman, R. E., dan McVea, J., 2001., *A Stakeholder Approach to Strategic Management.*;
- Gujarati., 2004., *Basic Econometrics.* Fourth Edition. The Mc Graw-Hill Companies.
- Gray, R., Kouhy, R., dan Lavers, S., 1995., *Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure.* Accounting, Auditing & Accountability Journal, 8(2).;
- Halim, Abdul. 2007., *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.;
- Halim, Abdulah dan Abdullah, Syukuriy., 2005., *"Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)"*, [http://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdulhalim-dan-syukriy-abdullah.](http://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdulhalim-dan-syukriy-abdullah), [09 September 2016].;
- Harumiati, Yayuk., 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggara.*, Tesis. FEB-Universitas Sebelas Maret.;
- Heriningsih, Suchayo. Marita., 2013., *Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah*

- Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa).*, Buletin Ekonomi, 11 (1) April 2013;
- Hermaningsih. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Demak)*. Tesis. Universitas Diponegoro.;
- Indonesia Governance Index, 2014., *Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014 - 34 Kabupaten/Kota di Indonesia – Menata Indonesia dari Daerah.*;
- Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
- Januarti, Indira. 2009. *“Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi 12 (SNA 12), Palembang, 4 - 6 November 2009
- Jensen. M dan W. Meckling. 1976. *Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. Jurnal of Financial Economics.;
- Julitawati, E., & Darwanis, J., (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi ISSN, 2302, 0164.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)., *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <http://kbbi.web.id/kinerja>, [09 September 2016]
- Kawedar, W., 2010. *Opini Audit Dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ Yang Mengalami Penurunan Opini Audit)*. Journal Of Accounting And Auditing, 6(1);
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen Otonomi Daerah., *Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2009-2013*. <http://otda.kemendagri.go.id/> [20 September 2015].;
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah., *Laporan Realisasi APBD 2009-2013*. www.djpk.depkeu.go.id [20 September 2014].;
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London, SAGE Publications;
- Maemunah, M. (2006). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi, 9.;
- Mahmudi, S. A., (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.;
- Mahsun, Mohamad, 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta.;
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Miranti, Laras. 2009.;
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013., *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret : Surakarta.;
- Moe, T. M. 1984. *The New Economics Of Organization*. *American Journal of Political Science* 28(5).;
- Mulyadi, & Kanaka Puradiredja., 2002., *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.;
- Mustikarini, Widya Astuti., Fitriarsari, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin, 20-23 September 2012.;
- Nugroho, F., & Rohman, A., (2012). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)*, Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UNIP.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.*;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009, tentang *Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005.;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007., Tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008., Tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008.;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010., Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.;
- Pratidina, M., dan Pusposari, D., 2012., *Kinerja Keuangan Pemerintah Serta Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008–2010*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. ;
- Pratiwi, Mutiana., 2007., *Efektifitas Pajak Hotel dan Restaurant, dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi*, Akuntansi, UPI “YPTK”, Padang.;
- Puspa, A., Enggar Diah., dan Sifa Fauziah, 2012. *Perbedaan Kinerja Auditor Berdasarkan Gender (Studi pada Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi)* Jurnal Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis-ISSN-2252-3936, Universitas Widyatama.
- Rai, I. Gusti. Agung., 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Penerbit Salemba.;
- Rasono. 2013. *Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Kab./Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2011*. Tesis. Universitas Padjajaran.;
- Sari, N. P., dan Yahya, I., (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah/Kota di Propinsi Riau*. Jurnal Akuntansi, 42;
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business-A Skill Building Approach-5th Edition*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd. 2006.;
- Setiawan, W., dan MUID, D. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.;
- Simbolon Anthon, 2006, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Edisi Revisi, Penerbit UGM, Yogyakarta.;
- Stephen P. Robbins, 2006. *Perilaku Organisasi*., Edisi Kesepuluh. Jakarta- Indeks.;
- Sudarsana dan Rahardjo. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. *Journal Of Accounting* Volume 2, Nomor 4 Tahun 2013.;
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.;
- Suhardjanto, Djoko., dan Yulianingtyas, Rena Rukmita., 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol. 8 (1), pp. 1-94.;
- Supranto, J.,M.A., (2009). *Statistik Teori & Aplikasi Jilid 2.*, Jakarta. Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga.;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. ;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. ;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
- Wenny Budianto, 2012. *Pengaruh Opini, Temuan Audit, dan Gender Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 – 2010.*; Jurnal Universitas Indonesia.;
- Westin, Susan S. 1998. *Performance Measurement and Evaluation Definition and Relationship*. GAO issued May 2005.;

Winarna, Jaka., dan Murni, Sri., 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar, 26-28 Juli.;